

Judul : Ada jalur cepat Imigrasi, jemaah haji jadi mudah beribadah
Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Ada Jalur Cepat Imigrasi Jemaah Haji Jadi Mudah Beribadah

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengapresiasi layanan *fast track* (jalur cepat) di Embarkasi Solo dan Surabaya. Layanan *fast track* di bandara ini dinilai sangat memudahkan para jemaah haji Indonesia saat memasuki Arab Saudi.

Dia mengatakan, layanan *fast track* guna mempercepat pelayanan pemeriksaan dokumen keimigrasian (*pre-departure clearance*) bagi jemaah haji, seperti visa dan paspor. Waktu yang dibutuhkan dengan layanan *fast track* ini tidak lebih dari 2 menit. Hal ini sangat membantu jemaah haji Indonesia ketika tiba di bandara tujuan.

"Dengan adanya fasilitas *fast track* ini, jemaah tidak perlu lagi ada proses imigrasi, dan bisa langsung melanjutkan perjalanan beribadah di Tanah Suci. Jika tidak ada layanan *fast track*,

biasanya penyelesaian imigrasi bisa memakan waktu sekitar dua sampai lima jam," kata Ace, Senin (27/5/2024).

Lebih lanjut, Ace mendukung keputusan Pemerintah Arab Saudi yang mengeluarkan kartu pintar (*smart card*) untuk dibagikan kepada jemaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M. Kartu pintar ini juga sebagai akses mengikuti rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

"Smart Card bertujuan untuk mencegah jemaah yang tersesat dengan kartu ini jemaah dapat terdeteksi kemanapun mereka pergi," pungkasnya.

Sementara, anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya menyoroti masalah keterlambatan keberangkatan calon jemaah haji

yang berulang. Terbaru, pesawat Garuda Indonesia yang sejatinya akan mengangkut calon jemaah haji kloter 41 embarkasi Donohudan itu disebut mengalami kerusakan mesin.

"Insiden tersebut menimbulkan efek domino, yakni penundaan terhadap kloter-kloter selanjutnya. Akibatnya, jumlah calon jemaah yang terdampak keterlambatan jadi lebih banyak, bahkan ada yang terpaksa menunggu hingga 7 jam. Ini jelas sangat melelahkan fisik dan mental, khususnya bagi jemaah haji lansia," tegas Wisnu.

Dia mendorong dilakukannya evaluasi secara mendasar terkait dengan layanan penerbangan haji selama ini. Salah satunya, gagasan terkait pengadaan layanan penerbangan bagi calon jemaah haji yang harus dibuka seluas-luasnya bagi semua maskapai.

Menurutnya, dua insiden krusial yang terjadi dalam rentang waktu kurang dari dua pekan ini semakin memperkuat urgensi untuk segera dilakukannya evaluasi mendasar terhadap pengadaan maskapai haji.

"Sejak awal, posisi kami adalah mendorong dibukanya kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap maskapai untuk berlomba memberikan penawaran dan layanan terbaik bagi calon jemaah haji," ucapnya.

Anggota DPR Dapil Jateng I ini menjelaskan, melalui mekanisme open tender yang transparan, diharapkan ada kompetisi yang sehat. Dengan adanya kompetisi itu bisa menghasilkan harga bersaing sekaligus bisa memberi lebih banyak opsi atau tawaran bagi para pengambil kebijakan. ■ KAL